

**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PERHUBUNGAN**



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

SK TIM PENYUSUN RENJA PD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024.....	oo
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishub Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5 Perumusan Tujuan dan Sasaran.....	45
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	50
Pohon Masalah.....	54

Pohon Tujuan Kinerja.....	55
---------------------------	----

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas).....	56
---	----

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DISHUB Tahun 2020.....	65
--	----

BAB VI PENUTUP

4.1 Penutup	69
-------------------	----

DAFTAR TABEL

1. Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	23
2. Tabel (T-C.29) 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d thn 2020 Kabupaten Malinau.....	28
3. Tabel (T-C 30) 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.....	34
4. Tabel (T-C 31) 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	41
5. Tabel (T-C 32) 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan (Kegiatan Musrenbang & Pokir DPRD) tahun 2022 Kabupaten Malinau.....	46
6. Tabel (T-C 33) 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	50
7. Tabel 4.1 Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2020.....	65

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau. Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu segera ditindaklanjuti dengan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk mensinergikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini, mensinkronkan program Perangkat Daerah dengan program regional dan sektoral serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau ini disusun sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2024 dengan mengacu kepada RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Malinau.

Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Oleh karenanya sejalan dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau ini disampaikan terima kasih.

Malinau, 13 Maret 2023.

Kepala Dinas Perhubungan,



Ajang Kahang, S. Sos., M. Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19681012 199803 1 009



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 376 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi dan mempertimbangkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung mewujudkan visi Kabupaten Malinau yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera didukung pemerintahan yang profesional”

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah :

- a. Undang–undang nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Undang–undang nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang–undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang–undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- e. Undang–undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- f. Peraturan Pemerintah RI nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- h. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah , serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Keputusan Menteri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 9 tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025;
- m. Peraturan Bupati Malinau nomor 4 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau tahun 2017 nomor 24);
- n. Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Malinau tahun 2023;
- o. Keputusan Bupati Nomor 050/K.89/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2024 **dimaksudkan** menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas Perhubungan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Malinau tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau selama tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pengelolaan Data dan Informasi, memuat data-data dan kedudukan Dinas Perhubungan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan

kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yaitu seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023, baik program prioritas / strategis (yang termuat dalam Tabel T-C.33 Bab III sub bab 3.3) maupun program generik (kesekretariatan)

BAB V PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

Pengolahan Data dan Informasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah termasuk Dinas Perhubungan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu agendanya adalah menjalankan pemerintahan yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan yang sebaik –baiknya kepada masyarakat, serta mengembangkan Prasarana dan Sarana Transportasi di wilayah Kabupaten Malinau.

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 134 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Malinau. Sebagaimana telah diubah berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Malinau nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Perhubungan adalah salah satu Dinas / Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan serta menyelenggarakan sebagian

urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Sebagai salah satu organisasi instansi Pemerintah yang mendapat tugas pokok dan fungsi tersebut mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan dan tindakannya kepada Pemerintah Daerah dan Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Bab II kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pasal 249 yang berbunyi “Dinas Perhubungan Darat, angkutan Sungai dan Penyebrangan, Bidang Perhubungan Udara yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten”.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang pada prioritas pembangunan, maka aspek strategis yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kab. Malinau sebagai berikut :

1. Menciptakan pelayanan jasa transportasi yang handal, murah, aman dan lancar sebagai urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Terwujudnya SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Terpenuhiya infrastruktur Perhubungan Udara, Darat dan Sungai.
4. Terbangunnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perhubungan.
5. Terwujudnya kelembagaan yang konvrehensif di bidang Perhubungan.
6. Terwujudnya peraturan-peraturan daerah di bidang Perhubungan.

Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau dengan Nomor 43 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Perhubungan;
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, membidangi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Unsur pelaksana adalah, bidang – bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Perhubungan Darat, Angkutan Sungai dan Penyeberangan, membawahi:
 - 1) Seksi lalu Lintas dan Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan;
 - 2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat, Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 - 3) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - b. Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang;
 - 2) Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronika dan Listrik;
 - 3) Seksi Meteorologi dan Geofisika.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - 1) Unsur Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Transportasi di Kabupaten Malinau mencakup pengembangan transportasi darat, laut dan udara. Sampai dengan tahun 2021, panjang jalan di Kabupaten Malinau mencapai 1.421,33 km, terdiri dari 255 km jalan negara, 247,10 km jalan provinsi, dan 919,23 km jalan kabupaten dan belum termasuk jalan desa. Dari panjang jalan kabupaten tersebut 165,03 km kondisinya telah diaspal, 225,95 km kerikil, dan 652,22 km masih tanah. Jalan beraspal masih relatif sedikit dibanding keseluruhan panjang jalan. Sebagian besar jenis jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antar desa dan antar kecamatan. Selain itu, jalan negara dan jalan provinsi tidak bertambah selama lima tahun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi adalah percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan khususnya yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

Dari kondisi jalan yang ada di Kabupaten Malinau sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan barang, meningkatkan biaya tinggi, menambah beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi potensi pengembangan daerah. Tantangan yang harus diatasi adalah memelihara dan meningkatkan kondisi jalan menjadi baik untuk mendorong percepatan kemajuan pembangunan desa di Kabupaten Malinau.

Sementara, jumlah kendaraan di Kabupaten Malinau terus meningkat setiap tahun dan jenisnya didominasi oleh sepeda motor. Pada tahun 2017 terdapat 8.307

unit sepeda motor. Mobil Penumpang merupakan jenis kendaraan terbanyak kedua dengan jumlah 1.064 unit lalu kemudian disusul oleh mobil barang sebanyak 928 unit. Tantangan yang harus diatasi adalah pembangunan jalan, penataan lalu lintas dan penyediaan rambu-rambu lalu lintas.

Dari segi intensitas transportasi udara, jumlah penerbangan dan jumlah penumpang meningkat secara nyata. Jumlah penerbangan kedatangan 1.921 dan penerbangan berangkat 2.016 dengan jumlah penumpang yang datang sebanyak 19.015 orang dan yang berangkat 21.210 orang. Data tersebut menunjukkan semakin tingginya mobilitas penduduk dan angkutan barang antar daerah di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi adalah peningkatan dan perluasan lapangan terbang perintis, serta peningkatan jangkauan dan perluasan jalur penerbangan terutama menuju desa-desa dan kecamatan-kecamatan di daerah pedalaman dan perbatasan.

Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 40.088,48 Km² terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" bujur timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" lintang utara. Kondisi geografis Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Secara umum untuk daerah datar (0-2 %) seluas 107,89 ha; bergelombang (2-15 %) seluas 70,66 ha; curam (15-40%) seluas 1.957,96 ha; sedangkan sangat curam (>40%) seluas 10.861,89 ha, dengan ketinggian diatas permukaan laut 7-1.000 m.

Perkembangan kondisi kependudukan mencerminkan dinamika pembangunan daerah yang diukur dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Pemahaman tentang perkembangan jumlah penduduk, struktur penduduk, serta

penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau akan sangat penting dalam merumuskan langkah-langkah yang terbaik untuk Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2021 adalah 82.510 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Malinau Kota yakni 188,41 jiwa/km² sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kayan Hilir yakni 0,16 jiwa/km².

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah RT/RW ditetapkan strategi pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah, mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana transportasi darat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman serta perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan.

Di dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Malinau Dinas Perhubungan masuk dalam sistem jaringan prasarana utama yang meliputi :

1. Sistem jaringan transportasi darat, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi: jaringan jalan (Jalan Umum dan Jalan Khusus), jaringan prasarana lalu lintas (Terminal Penunjang tipe C) dan jaringan layanan lalu lintas dan jaringan transportasi sungai.

2. Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud terdiri atas tatanan kepelabuhanan (Pelabuhan Umum dan Terminal) dan alur pelayaran.
3. Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana yang dimaksud terdiri atas tatanan kebandarudaraan (Bandara udara perintis) dan ruang udara untuk penerbangan meliputi Kawasan Keselamatan Operasional dan Penerbangan (KKOP), yang terdiri dari :
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan dibawah permukaan transisi;
 - d. kawasan dibawah permukaan horizontal dalam;
 - e. kawasan dibawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan dibawah permukaan horizontal luar.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat meliputi :

- a. peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer;
- b. peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal.

Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sungai disusun dengan memperhatikan :

- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keamanan dan keselamatan alur pelayaran sungai;

- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
- e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- f. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pengaturan pemanfaatan dan perlindungan Daerah Aliran Sungai menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pengembangan bandar udara mengacu pada daya dukung wilayah untuk menampung jumlah maksimum penumpang udara yang direncanakan;
- b. pemanfaatan ruang ditujukan untuk kebutuhan operasional bandar udara dan membatasi pemanfaatan untuk kegiatan komersial yang tidak mendukung fungsi utama bandara;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk kepentingan keselamatan penerbangan, manuver pendaratan dan tinggal landas serta pendaratan darurat, maka bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP)

yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan manuver penerbangan dan peraturan perundangan yang berlaku;

e. penetapan batas-batas kawasan kebisingan;

RKPD Kabupaten Malinau merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan provinsi Kalimantan Utara, karena itu RKPD harus mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, sehingga tercipta sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sebagai satu kesatuan NKRI.

Adapun 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang juga merupakan Prioritas Nasional dalam rancangan RKP tahun 2023 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas pembangunan wilayah Kalimantan pada tahun 2020-2024 yaitu yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi :

1. Hilirisasi pertanian, perkebunan dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas;

2. Penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir;
3. Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
4. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan; serta,
5. Pelestarian kawasan hutan dan daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia (Heart of Borneo).

11 (Sebelas) Rencana prioritas pembangunan di Kalimantan Utara meliputi :

1. Ketersediaan energi listrik. Meliputi pembangunan PLTMG 31 megawatt (MW) dan PLTA dengan kapasitas 10.000 MW.
2. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
3. Pembangunan kawasan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.
4. Pembangunan pelabuhan dan dermaga sungai.
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar secara menyeluruh.
6. Pembangunan dan pemenuhan infrastruktur rice and food estate.
7. Peningkatan bandara perintis di wilayah pedalaman dan perbatasan.
8. Pembangunan prasarana jalan, jembatan dan telekomunikasi, serta agrobisnis dan pariwisata di perbatasan.
9. Pembangunan Jembatan Bulungan – Tarakan (Bulan).
10. Pembangunan sarana sanitasi, air bersih dan air baku.
11. Penguatan pertahanan dan keamanan perbatasan, dengan dialokasikannya 11 titik untuk penempatan TNI.

Rencana prioritas pembangunan di Kabupaten Malinau meliputi:

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.
4. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
6. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (money follow programe).
7. Peningkatan pendapatan daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah. Renja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan(inputs), keluaran (outputs), hasil(outcomes), manfaat(benefits) dan dampak(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2022

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2021 sebesar Rp.11.372.263.355,00 dengan 2 program dan 10 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.10.942.019.963,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,60 %.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Pengadaan , Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas total anggaran sebesar Rp.700.000.000,00 tidak terealisasi karena belum mendapatkan izin dari Balai TSDP wilayah KaltimTara.
2. Terdapat sebelas kegiatan yang penyerapan anggarannya sempurna (100%) yaitu
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetak dan pengadaan
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau.
3. Sedangkan untuk program/kegiatan lainnya rata-rata penyerapan anggaran diatas 90%. Untuk itu Silpa dari Anggaran Dinas Perhubungan tidak mempengaruhi capaian sasaran kegiatan, karena kegiatan secara keseluruhan capaian fisiknya sebesar 100%.

Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

No	Progam/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Belanja Tidak Langsung (GAJI ASN)	5.103.437.355	5.021.828.909	98.40
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	228.586.600	191.632.900	83.64
3	Penyediaan bahan logistik kantor	51.708.800	51.700.800	99.98
4	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	6.500.000	6.500.000	100
5	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	999.605.000	823.274.000	82,36
6	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3.385.800.000	3.341.234.354	99.68
Program Pelayaran				
11	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.000.395.000	934.280.900	93,39
12	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	219.421.100	212.421.100	96.81
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
14	Pengadaan pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	62965..500	62.963.000	100
15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	313.844.000	296.184.000	94.37
	TOTAL	11.372.263.335	10.942.019.963	99.60

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2023 dengan dana sebesar Rp.13.121.698.700,00 terurai dalam 3 program dan 10 kegiatan dan 16 subkegiatan (Jika pergeseran Anggaran yang diajukan mendapat persetujuan), diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Malinau, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau adalah sebagai Pengarah. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Keterbatasan waktu, untuk kegiatan yang dibiayai pada dana APBD-P;
- c. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah dan kurangnya tenaga ASN pada Dinas Perhubungan;

- d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.

- b. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
- 2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
- 3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Perhubungan, dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Fisik dan Prasarana.

4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Malinau dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
 - b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang.

TABEL (T-C 29) 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD s/d TAHUN 2022
KABUPATEN MALINAU

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020 (Tahun lalu n-2)			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Tahun berjalan n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.09	Wajib									
2.09. 02	Dinas Perhubungan									
2.09. 2.09. 01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga honor	113 orang	5 tahun	5 tahun	5 tahun	93%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	29 jenis	2 tahun	2 tahun	2 tahun	99%	0	0	0
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	15.000 lembar	5 tahun	5 tahun	5 tahun	100%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan minuman	3 jenis	5 tahun	5 tahun	5 tahun	100%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Jumlah rakor luar dan dalam daerah	30 kali	2 tahun	2 tahun	2 tahun	99%	0	0	0
2.09.2.09.01.01.20	Pengadaan Pakaian Wasdal	Jumlah pakaian dinas wasdal	60 stel	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	0	0	0
2.09.2.09.01.01.21	Pengadaan suku cadang	Jumlah suku cadang kendaraan	1 unit	5 tahun	5 tahun	5 tahun	100%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09.2.09.01.01.24	Pengadaan bahan bakar minyak dan gas	Jumlah solar dan bensin	2 jenis	5 tahun	5 tahun	5 tahun	100%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09.2.09.01.01.25	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan OPS dinas	Jumlah kendaraan dinas	1 unit	5 tahun	5 tahun	5 tahun	100%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09. 2.09. 01. 15	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan									

2.09.2.09.01.15.18	Pembangunan jalan menuju bandara perintis bahau hulu (DAK)	Jumlah panjang badan jalan	1.200 meter	1 tahun	1 tahun	1 tahun	95%	0 tahun	0 tahun	100%
2.09.2.09.01.15.19	Pembangunan jalan menuju bandara perintis pujungan (DAK)	Jumlah panjang badan jalan	800 meter	1 tahun	1 tahun	1 tahun	98%	0 tahun	0 tahun	100%
2.09. 2.09. 01. 16	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ									
2.09.2.09.01.16.09	Operasional UPTD PKB	Jumlah kendaraan KIR	600 unit	5 tahun	5 tahun	5 tahun	100%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09.2.09.01.16.07	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan umum layak operasi	50 unit	2 tahun	2 tahun	2 tahun	99%	2 tahun	2 tahun	100%
2.09.2.09.01.16.10	Operasional UPTD Terminal	Jumlah kendaraan yang dilayani	350 unit	5 tahun	5 tahun	5 tahun	99%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09. 2.09. 01. 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan									
2.09.2.09.01.18.04	Operasional UPTD pelabuhan kelapis	Jumlah kapal barang yang bongkar muat	16 kapal	5 tahun	5 tahun	5 tahun	100%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09.2.09.01.18.05	Pemeliharaan pelabuhan speed boat	Jumlah Speed boat yang berangkat & datang	12 unit	5 tahun	5 tahun	5 tahun	100%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09. 2.09. 01. 17	Program peningkatan pelayanan angkutan									
2.09.2.09.01.17.18	Pengendalian dan pengawasan hari besar dan hari raya keagamaan	Jumlah personil pengamanan	56 orang	5 tahun	5 tahun	5 tahun	98%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09. 2.09. 01. 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas									
2.09.2.09.01.19.04	Pemeliharaan traffic light	Jumlah traffic light dengan baik	3 lokasi	5 tahun	5 tahun	5 tahun	96%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09. 2.09. 01.21	Program peningkatan pelayanan udara daerah terisolir									
2.09.2.09.01.21.03	Pengadaan fasilitas dan pemeliharaan Bandara Kol.R.A Bessing Malinau	Jumlah petugas kebersihan Terminal Bandara RA. Bessing	7 orang	5 tahun	5 tahun	5 tahun	100%	5 tahun	5 tahun	100%
2.09.2.09.01.21.14	Pembayaran gaji personil bandara udara dan keamanan, keselamatan penerbangan	Jumlah petugas keamanan dan keselamatan	10 orang	5 tahun	5 tahun	5 tahun	88%	5 tahun	5 tahun	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Dinas Perhubungan, .

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya

Permasalahan

Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan

yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan sehingga berdampak pada pencapaian IKK antara lain :

1. Kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat, baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan jasa angkutan umum kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.
2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan yang memadai.
3. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktivitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga berpotensi terhadap ketidakdisiplinan berlalu lintas, kesemrawutan berlalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan.
4. Fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan dalam bentuk Marka, Rambu, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan paku jalan serta pagar pengaman jalan (Guardrail) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam

berlalu lintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional.

5. Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal dibidang pelayanan jasa angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai kurang optimal.
6. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.
7. Kurang optimalnya sarana prasarana bongkar muat barang.
8. Ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum sepenuhnya memadai dan perlu adanya perbaikan dan rehabilitasi.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mentaati peraturan tata tertib berlalu lintas.
10. Belum tersedianya bangunan gedung pengujian berkala kendaraan bermotor, pelayanan pengujian kir kendaraan umum dan barang tidak dapat dilakukan lagi di UPTD PKB Kabupaten Malinau karena tidak memenuhi akreditasi.
11. Lima lapangan terbang perintis yang ada di Kabupaten Malinau Statusnya masih milik Pemda Kabupaten belum diserahkan ke Pemda Provinsi sesuai Kepmen 050-5889 tahun 2021 terkait kewenangan Pengelolaan Bandara.
12. Belum terbangunnya Jembatan Timbang untuk Poros selatan dan Poros Utara sebagai akses masuk kendaraan angkutan barang untuk pengamanan Jalan dari muatan lebih.
13. Belum adanya Pelabuhan Pengumpan Lokal untuk speed Kecil Rute KTT

14. Resiko Beban berat pada Jembatan penyebrangan Sungai Sesayap akibat antrian kendaraan karena lampu Merah.
15. Resiko kecelakaan penumpang di pelabuhan speed karena ponton untuk sandaran speed dan naik turun penumpang serta barang dalam kondisi bocor.
16. Sering terjadinya penunggakan pembayaran Listrik dan Air karena belum terakomodir penganggarannya.

TABEL (T-C 30) 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALINAU

No.	Standar Pelayanan Minimal/Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	-	50%	70	70	70	70	66	80	85	86	
2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	-		80	90	100	100	60	90	100	100	
3	Terlaksananya pelayanan uji berkala	-		600	400	500	500	1020	400	500	500	
4	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	-		90	90	100	100	90	90	100	100	
5	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	-		100	100	100	100	70	100	100	100	
6	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Indikator SPM (Permenhub No. 81 thn 2011)												
1.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	75%	-	6	6	6	6	6	6	6	6	

2.	Tersediaanya terminal angkutan penumpang pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	-	3	3	3	3	3	3	3	3	
3.	Tersediaanya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kab/kota	60%	-	3	3	110	135	3	3	110	135	
4.	Tersediaanya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	50%	-	7	7	7	7	7	7	7	7	
5.	Tersediaanya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
7.	Tersediaanya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	75%	-	24	25	26	26	24	25	26	26	
8.	Tersediaanya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayar	40%	-	6	6	6	6	6	6	6	6	
9.	Tersediaanya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau	60%	-	2	2	2	2	2	2	2	2	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Demi mewujudkan transportasi yang tertib, lancar dan aman maka Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana Perhubungan serta meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas. Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau antara lain :

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi, Renstra, RTRW, KLHS;

1. Penertiban parkir kendaraan berdimensi besar yang tidak sesuai dengan kelas jalan (dalam rangka menunjang program RT bersih).
2. Mengatur lalu lintas pada jam-jam sibuk di persimpangan dan sekolah yang padat kendaraan (dalam rangka menunjang program wajib belajar 16 tahun).
3. Memberikan kesempatan kepada pengusaha jasa angkutan untuk mengangkut hasil beras daerah dari sentra-sentra produksi di pedesaan menuju ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten (dalam rangka menunjang program RASDA).
4. Mensosialisasikan dan memfasilitasi Putra-Putri Malinau agar mau meningkatkan SDM nya dibidang Transfortasi Darat Melalui MOu dan MOA Pemerintah Daerah Bersama Politeknik Transportasi Darat Indonesia PTDI-STTD.

5. Penggantian Tembok sorum UMKM Malinau Kota dengan pagar transparan agar tidak menghalangi pandangan pengendara.
6. Pemindahan Tugu GERDEMA pada perempatan Ujung Jembatan Malinau Utara yang juga menghalangi pemandangan pengendara pada arah jalan berlawanan seperti dari arah Kelapis ke RSUD.
7. Penertiban tempat pemasangan Baleho/Spanduk.

1. Isu Strategis Bidang Perhubungan Darat dan Sungai

- a. Alat pemberi isyarat lalu lintas yang masih kurang di beberapa simpangan sehingga rawan kecelakaan pada jam-jam sibuk.
- b. Menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Hal ini disebabkan mudahnya masyarakat memperoleh kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) sehingga berdampak pada berkurangnya penghasilan para Supir.
- c. Belum ditetapkannya kawasan tertib lalu lintas dalam upaya memberikan kenyamanan para pengguna jalan dalam berlalu lintas dalam rangka menekan tingginya korban akibat kecelakaan lalu lintas.
- d. Dengan adanya Terminal Kota sebagai Simpul Jaringan Trayek, maka perlu disediakan Sub-sub terminal sebagai pendukung tempat pemberhentian akhir Trayek angkutan serta tempat menaik dan menurunkan penumpang.
- e. Rencana Pemprov utk membangun terminal tipe C di lokasi sesua yang ditandai dengan permohonan pembebasan lahan diwilayah tersebut.

- f. Kurangnya kemampuan SDM dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat.
- g. Minimnya Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam upaya mendukung keselamatan lalu lintas sebagaimana Zero Accident.
- h. Belum terbangunnya Jembatan Timbang untuk Poros selatan dan Poros Utara sebagai akses masuk kendaraan angkutan barang (Sawit) untuk pengamanan Jalan dari muatan lebih.
- i. Belum adanya Pelabuhan pengumpan local utk speed kecil Rute Malinau - KTT
- j. Belum optimalnya penanganan Perijinan Angkutan Umum Orang/Barang karena adanya pembagian urusan penerbitan perijinan dengan Instansi terkait.
- i. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jembatan dan dermaga tambat perahu di setiap kecamatan kurang tersedia dalam melaksanakan aktifitas masyarakat dari kecamatan ke kecamatan.
- j. Menurut hasil survey bahwa alur pelayaran sungai di sesayap banyak mengalami pedangkalan di sebabkan erosi bibir-bibir sungai, maupun banjir besar yang sering membawa material kayu-kayu sehingga mempengaruhi lambatnya transportasi sungai.
- k. Sebagai pemilik atau kruw kapal barang, belum bersedia membongkar muat barangnya di pelabuhan bongkar muat kelapis yang sudah disiapkan pemerintah di karenakan kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang belum optimal.

- l. Hasil monitoring, Evaluasi dan pengendalian di lapangan kurang terjadinya komunikasi atau sosialisasi yang baik antara pemilik kapal dengan petugas perhubungan di lapangan, mengenai aturan pentingnya pelayaran di perairan.
- m. Sarana dan Prasarana penunjang pelabuhan baik speed boat maupun bongkar muat barang, belum memadai.

2. Isu Strategis Bidang Perhubungan Udara

- a. Menyediakan dana subsidi angkutan perintis udara yang di sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah melalui bagian Ekonomi Setkab.
- b. Status masih milik Pemda Kabupaten belum diserahkan ke Pemda Provinsi sesuai dgn Kepmen 050-5889 terkait kewenangan Pengelolaan Bandara.

3. Isu Strategis Kabupaten Malinau adalah :

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih).
- b. Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan.
- c. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, lingkungan hidup dan kawasan permukiman.
- d. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

- e. Masih adanya kesenjangan wilayah dan belum optimalnya infrastruktur (infrastruktur layanan dasar, ekonomi, ketenagalistrikan, air dan Teknologi Informasi Komputer)
- f. Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi.
- g. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- h. Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan harus berpijak kepada kebijakan pemerintah provinsi secara umum, yang terangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau. Tujuan Dinas Perhubungan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 pada misi ketiga adalah mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu: jalan, airbersih, listrik, telekomunikasi, dan informasi.

TABEL(T-C 31) 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN MALINAU

No.	Rancangan awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji ASN)	Kab. Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 orang/bulan	4.934.302.972	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji ASN)	Kab. Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 orang/bulan	4.934.302.972	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malinau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	80.000.000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malinau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	100.000.000,-	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malinau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	150.000.000,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malinau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	200.000.000,-	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malinau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	30.000.000,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malinau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	40.000.000,-	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	191.200.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	200.000.000,-	
5						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	150.000.000,-	

								yang Disediakan			
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.308.800.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.308.800.000,-	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malinau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	20.000.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malinau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	30.000.000,-	
8	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.500.000.000,-	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.500.000.000,-	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.000.000.000,-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.000.000.000,-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
10	Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	24 unit	30.000.000,-	Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	24 unit	40.000.000,-	
11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Malinau	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	30 unit	40.000.000,-	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Malinau	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	30 unit	50.000.000,-	

12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	20.000.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan & Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Koordinasi & Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan & Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	25.000.000,-	
13	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Malinau	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 unit	60.000.000,-	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Malinau	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 unit	60.000.000,-	
14	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	20.000.000,-	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	25.000.000,-	
15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Malinau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Paket	3.000.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Gedung Bangunan PKB)	Kab. Malinau	Jumlah bangunan Gedung	1 Paket	1.000.000.000	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Kab. Malinau	Jumlah peralatan dan perlengkapan uji kendaraan	1 paket	2.000.000.000	

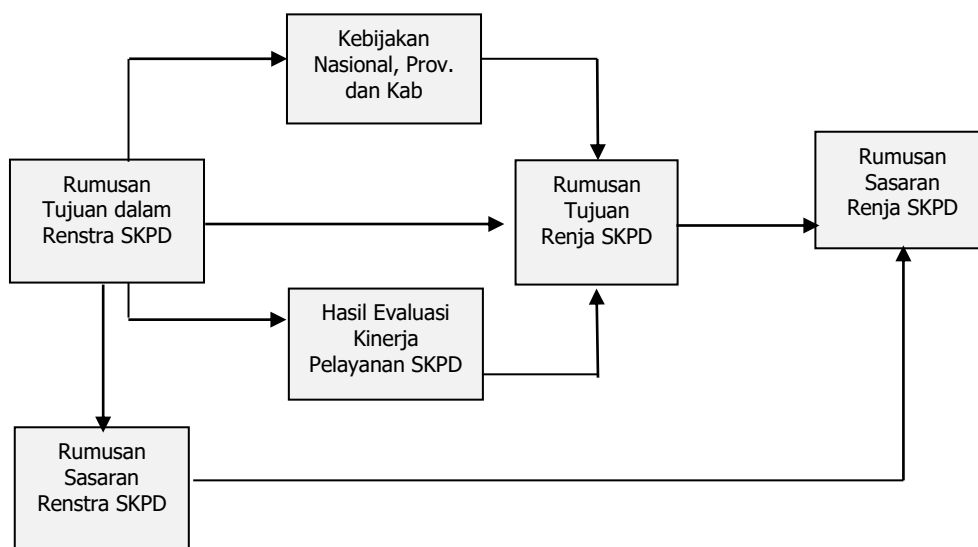
						Berkala Kendaraan Bermotor (Peralatan Uji Kendaraan Bermotor)					
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											
16	Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Paket	1.000.000.000,-	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malin au	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2 Paket	2.000.000.000	
17	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2 Paket	2.000.000.000	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malin au	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Paket	3.000.000.000	
TOTAL					12.312.262.972	TOTAL					15.601.062.972

2.5. PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tercantum dalam Renstra SKPD “ **Mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan Udara di Kabupaten Malinau** “ dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD.

Sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kab.Malinau dalam mencapai tujuan diatas adalah “ **Meningkatnya Sarana & Prasarana perhubungan darat, sungai dan udara** “

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN



2.6. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2024. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau disajikan pada tabel berikut:

TABEL (T-C 32) 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MUSREMBANG
TAHUN 2022 KABUPATEN MALINAU

No	Program/Kegiatan (sesuai nomenklatur usulan musrenbang /Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Cat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Usulan Musrenbang				
1	Pembangunan Trafic Light	Simpang 4 Ujung Jembatan Malinau Utara, Simpang 4 kantor	Presentase Jumlah Traficlight	1 Paket	TERAKOMODIR Diusulkan ke APBD I

		Desa, Simpang 4 Terminal, Simpang 4 Batu Lidung			
2	Pembangunan Dermaga Pasar Kanaan	Pulau Sapi	Presentase Jumlah	1 Paket	DIUSULKAN KE APBD I
3	Pembangunan Terminal Desa Wisata Long Loreh	Long Loreh	Presentase Jumlah Terminal	1 Paket	DIUSULKAN KE APBD I
4	Normalisasi Giram Turuk	Lg Kebinu	Presentase Jumlah Lintasan	1 Paket	DIUSULKAN (APBN)
5	Pembangunan Drainase Lapangan Terbang Perintis	Lg Fala	Presentase Jumlah Draenase	2 KM	OPD DPU
6	Pemeliharaan Lapangan Terbang Perintis	Lg Fala	Presentase Jumlah	360 M	Diusulkan ke APBD Tk. I
7	Pembangunan Lapter Perintis Bahau Hulu	Long Alango	Presentase Jumlah Lapter	978 m x 70 m	BELUM ADA PROGRAM DI SIPD
8	Pembangunan Dermaga Permanen	Lalut Bernyiu	Presentase Jumlah Dermaga	4 x 5 m	DIUSULKAN KE APBD I
9	Pembangunan Lapangan Terbang Sungai Pako'	Data Dian	Presentase Jumlah Lapter	1 Paket	BELUM ADA PROGRAM DI SIPD
10	Rehap rumah tunggu Lapter	Sule	Presentase Jumlah gedung	1 Paket	OPD DPU
11	Semenisasi jalan menuju bandara	Sule	Presentase Jumlah Jalan	1 Paket	OPD DPU
12	Pembangunan Garasi Lapter	Data Dian	Presentase Jumlah Luas	1 Paket	OPD DPU
13	Pembangunan Bandara long Sule yang presentatif	Sule	Presentase Jumlah Lapter	1 Paket	BELUM ADA PROGRAM DI SIPD
14	Pembangunan Lapter Printis Desa Sungai Anai	Sungai Anai	Presentase Jumlah Lapter	1 Pekt	BELUM ADA PROGRAM DI SIPD
15	Pengaspalan Bandara Long Lebusan	Long Lebusan	Presentase Jumlah bobot	1 Paket	BELUM ADA PROGRAM DI SIPD

16	Pembangunan Ruang Tungguh Bandara Mahak Baru	Mahak Baru	Presentase Jumlah luas	18m x 20m	OPD DPU
17	Peningkatan Landasan Bandara Mahak Baru	Mahak Baru	Presentase Jumlah Luas	1000m x 50 M	BELUM ADA PROGRAM DI SIPD
18	Pembangunan Jaringan Telkomsel	Desa Agung Baru	Presentase Jumlah Tower	1 Paket	KOMINFO
19	Pembangunan Gedung Ruang Tunggu Bandara	Dumu Mahak	Presentase Jumlah	8 x 14 M	OPD DPU
20	Layanan Penerbangan Subsidi MAF/Susi/SMART	Lg. Fala	Presentase Jumlah Penerbangan	2 kali / bulan	Kewenangan Provinsi dan Pusat
21	Penambahan Penerbangan Subsidi ke Daerah Perbatasan	Usulan 5 Desa	Presentase Jumlah Penerbangan	Rata – rata 6 x dalam satu minggu	Kewenangan Provinsi dan Pusat
22	Pengadaan solar Tower	Data Dian dan Long Sule	Presentase Jumlah Tower	1 Paket	OPD KOMINFO
23	Pengadaan Mesin Diesel Tower	Data Dian dan Long Sule	Presentase Jumlah Mesin	1 Paket	OPD KOMINFO
24	Subsidi penerbangan Pesawat Lebusan - Malinau PP	Long Lebusan	Presentase Jumlah Penerbangan	12 Kali	BAGIAN EKONOMI
25	Subsidi Penerbangan Pesawat Lebusan - Tanjung Selor PP	Long Lebusan	Presentase Jumlah Penerbangan	12 Kali	BAGIAN EKONOMI
26	Subsidi penerbangan Pesawat Lebusan - Samarinda PP	Long Lebusan	Presentase Jumlah Penerbangan	12 Kali	BAGIAN EKONOMI
27	Subsidi Penerbangan Tanjung Selor Mahak Baru	Mahak Baru	Presentase Jumlah Penerbangan	2 x 1 Minggu	BAGIAN EKONOMI
28	Subsidi Penerbangan Mahak Baru Samarinda	Mahak Baru	Presentase Jumlah Penerbangan	2x 1 Minggu	BAGIAN EKONOMI

29	Subsidi Penerbangan Mahak Baru Malinau	Mahak Baru	Presentase Jumlah Penerbangan	2 x 1 Minggu	BAGIAN EKONOMI
30	Subsidi Ongkos Angkut Sembako	Mahak Baru	Presentase Subsidi	1 X 1 Tahun	DISPERINDAK

Alasan tidak di akomodir karena keterbatasan APBD, Tidak Skala Prioritas, tidak ada pada Program DISHUB, Menjadi kewenangan OPD lain, Kewenangan Pusat/Provinsi dan tidak masuk dalam lokasi prioritas DAK atau khusus daerah perbatasan dan pedalaman.

No	Program/Kegiatan (sesuai nomenklatur usulan musrenbang /Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Cat
1	2	3	4	5	6
	Pokir DPRD				
1	PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PEDESAAN	DESA LONG LIKU KEC. MENTARANG HULU	Jumlah Pembangkit Listrik	50 Buah	OPD terkait DPU PERKIM
2	PEMBANGUNAN DERMAGA BETON DAN JALAN MENUJU DARMAGA DESA LONG MEKATIP	DESA LONG MEKATIP KECAMATAN MENTARANG HULU	Unit Dermaga	DARMAGA 8 X 10	Diusulkan ke APBD Tk. I
3	PEMBANGUNAN DERMAGA BETON DAN JALAN MENUJU DARMAGA DESA LONG	DESA LONG MEKATIP KECAMATAN	Panjang Jalan	JALAN MENUJU DERMAGA 30 M	OPD terkait DPU PERKIM

	MEKATIP	MENTARA NG HULU			
4	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	PEREMPAT AN MLN SEBERANG, TERMINAL KOTA, BELAKANG KANTOR BUPATI, PERTIGAA N SPN, PASAR INDUK	Jumlah Traficlight, Warning Traficlight dan Rambu Jalan	3, Paket, 10 Unit dan 1 Paket	Terakomodir dan diusulkan ke APBD I

Alasan tidak di akomodir karena Menjadi kewenangan OPD lain.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan.

1. Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat.
2. Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal.
3. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP.
4. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan sdp, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prsarana transportasi SDP, pengembangan sarana SDP, serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Arah kebijakan umum pembangunan nasional yang juga merupakan Agenda Pembangunan Nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

A. Kebijakan Prioritas Pembangunan

1. Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat.
2. Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal.
3. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP.
4. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan sdp, rehabilitasi & pemeliharaan sarana dan prsarana transportasi SDP, pengembangan sarana SDP, serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan.

B. Kebijakan Transportasi Darat dalam Otonomi Daerah

1. Mendorong daerah untuk menyusun perencanaan transportasi darat yang sinergis dengan rencana transportasi nasional.
2. Penyesuaian rencana transportasi nasional dengan kebijakan perencanaan transportasi di daerah.
3. Menjadi pedoman bagi perencanaan transportasi daerah.

4. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar daerah dalam rangka perencanaan transportasi nasional.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai kualifikasi dan kompetensi.

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dan Renstra SKPD

NO	Misi RPJMD	
3	Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan.	TERWUJUDNYA TRANSPORTASI YANG TERTIB, AMAN DAN LANCAR

Berdasarkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yakni “Pengembangan SDM, tata kelola pemerintahan dan infrastruktur yang mendukung penguatan ekonomi menuju kemandirian, kedamaian dan kesejahteraan.”

“Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)”

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tercantum dalam Renstra SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD, yaitu :

1. Perhubungan Darat dan Sungai :
 - a. Meningkatkan kemampuan jalan yang sudah menurun tingkat pelayanannya.
 - b. Memberikan kesempatan berusaha di bidang pelayanan jasa perhubungan secara adil, terbuka dan transparan kepada masyarakat dunia usaha.
 - c. Meningkatkan mutu keselamatan pelayaran melalui penyediaan fasilitas navigasi, serta pemeliharaan alur sungai.

- d. Membangun fasilitas transportasi sungai untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi orang dan barang dengan mempertimbangkan pola pengembangan wilayah, factor spesifik, dan pemilihan teknologi yang tepat.
- e. Meningkatkan SDM Penguji Kendaraan Bermotor
- f. Memfasilitasi dan sosialisasi tentang MOu Pemerintah Daerah bersama Politeknik Trasportasi Darat Indonesi PTDI-STTD

2. Perhubungan Udara

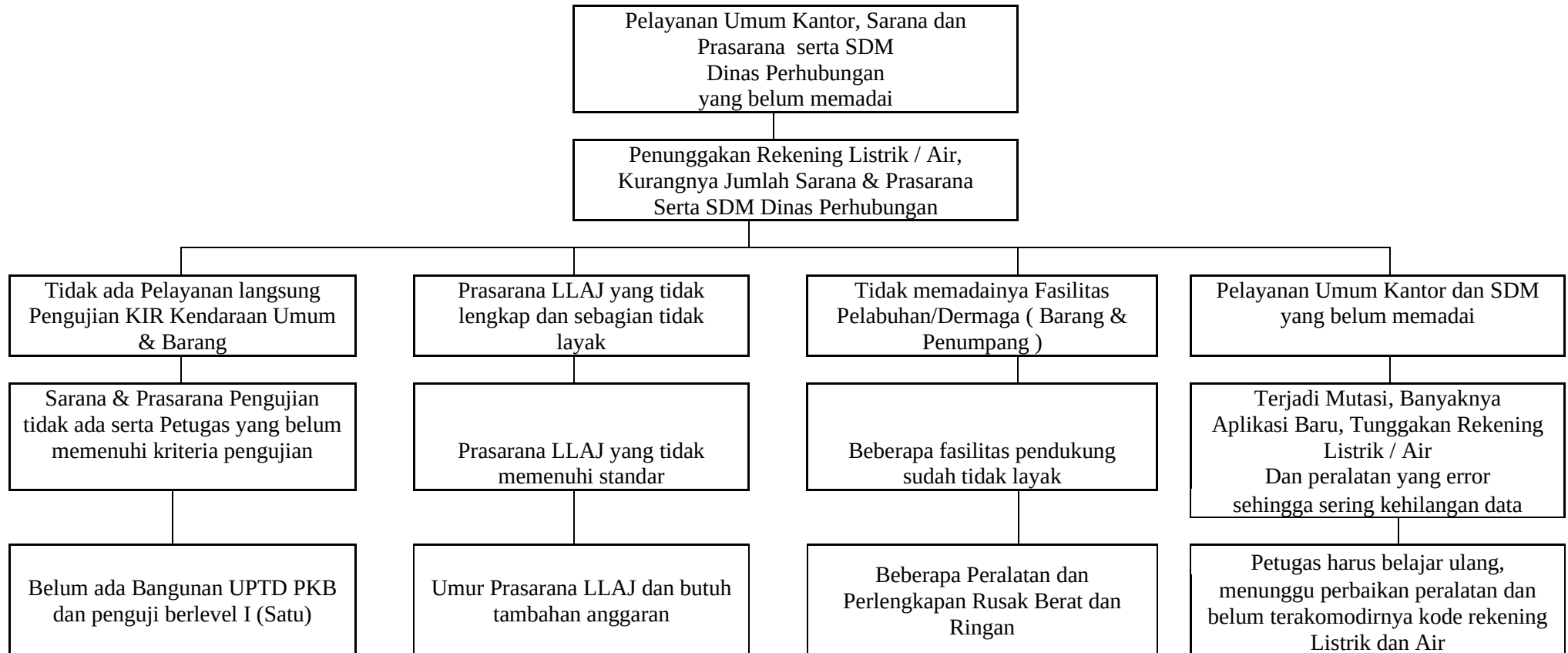
- a. Membangun sarana dan prasarana transportasi udara untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi orang dan barang dengan mempertimbangkan pola pengembangan wilayah, factor spesifik dan pemilihan teknologi yang tepat.
- b. Mengusulkan angkutan perintis udara yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan keselamatan penerbangan melalui penyediaan fasilitas komunikasi dan fasilitas navigasi serta pembinaan dan perbaikan armada udara bagi daerah-daerah yang sulit di jangkau sarana transportasi darat atau sungai.

Sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kab.Malinau dalam mencapai tujuan diatas antara lain :

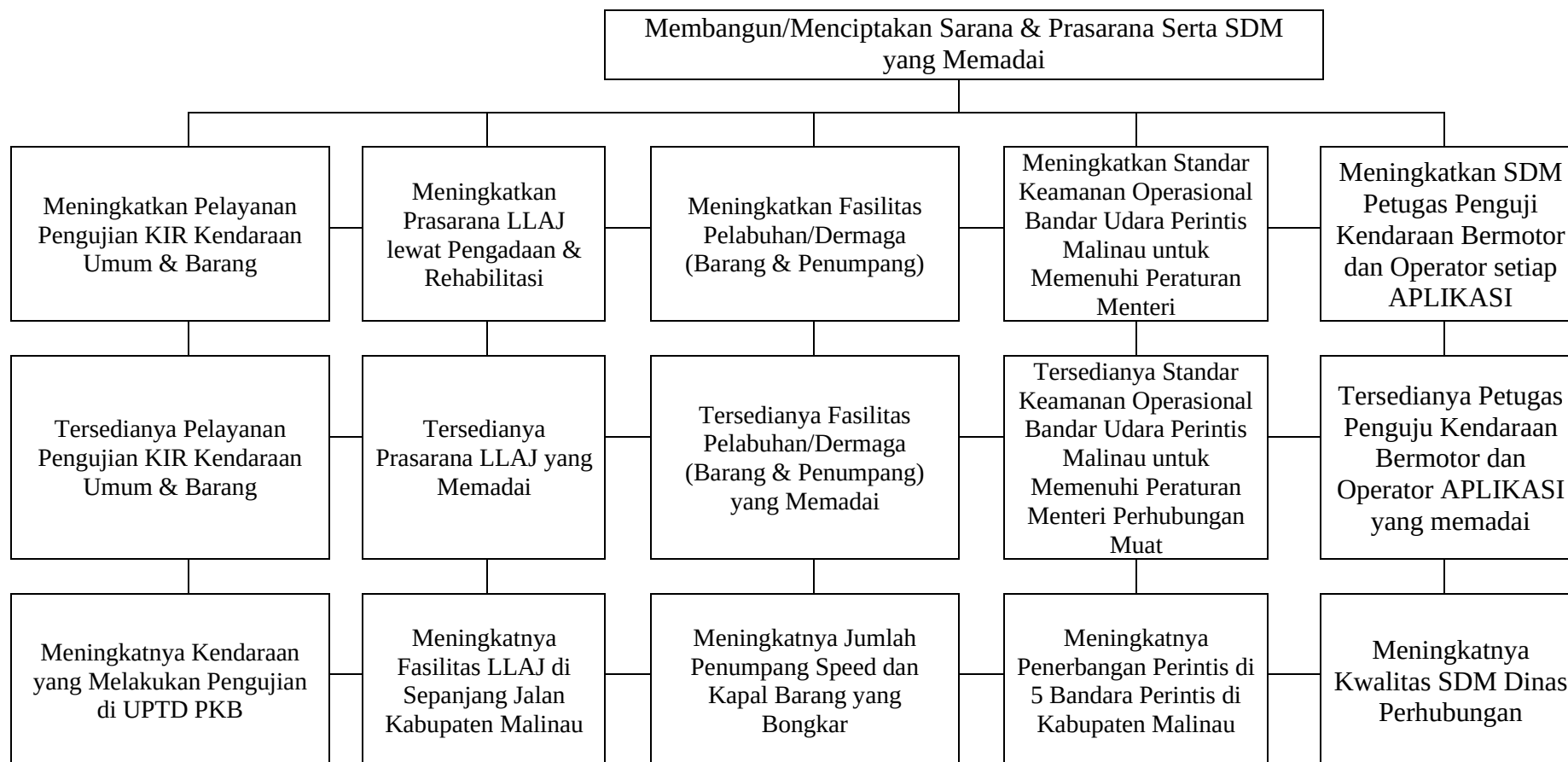
- 1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan jasa perhubungan.
- 2. Terwujudnya sarana perhubungan di Kabupaten Malinau yang memadai.
- 3. Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Malinau.
- 4. Tersedianya SDM Penguji Kendaraan Bermotor.

5. Terisinya formasi Taruna/I PTDI STTD.
6. Terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan, pengendalian, keamanan, ketertiban pelayaran.
7. Termonitor/terawasinya penerbangan perintis sebagai transportasi udara yang masih menjadi kewenangan Kabupaten Malinau.
8. Memastikan Pengelolaan Bandara Perintis apakah menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota.

POHON MASALAH



POHON TUJUAN KINERJA



3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas)

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera didukung pemerintahan yang profesional”, kemudian misi Kabupaten Malinau adalah :
 - a. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.
 - b. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan local.
 - c. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
 - d. Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan.
2. Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals), yaitu mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
3. Pembangunan Nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
4. Pencapaian SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimal baik di bidang Perhubungan yang mengacu pada Permenhub Nomor: PM. 81 Tahun 2011.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malinau, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

TABEL (T-C 33) 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN MALINAU

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.15	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN				12.312.262.972,-				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Malinau	100 %	9.082.262.972,-	APBD		100 %	5.000.000.000,-
2.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	Kab. Malinau	100 %	4.934.302.972,-	APBD		100 %	5.000.000.000,-
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	532 orang/bulan	4.934.302.972,-	APBD		532 orang/bulan	5.000.000.000,-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malinau	100 %	200.000.000,-	APBD		100 %	250.000.000,-
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malinau	3 Paket	200.000.000,-	APBD		3 Paket	250.000.000,-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	100 %	520.000.000,-	APBD		100 %	Totalkan,-
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	3 paket	115.000.000,-	APBD		3 paket	200.000.000,-
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan	Kab.	20 paket	175.000.000,-	APBD		25 paket	200.000.000,-

	Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan	Malinau						
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Malinau	3 paket	30.000.000,-	APBD		3 paket	40.000.000,-
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malinau	12 Laporan	200.000.000,-	APBD		12 Laporan	250.000.000,-
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malinau	100 %	2.647.960.000,-	APBD		100 %	2.647.960.000,-
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan - Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (3 Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan	Kab. Malinau	4 Unit	647.960.000,-	APBD		6 Unit	800.000.000,-
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Malinau	1 Unit	1.000.000.000,-	APBD		1 Unit	1.000.000.000,-
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Malinau	2 Unit	1.000.000.000,-	APBD		2 Unit	1.000.000.000,-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malinau	100 %	435.000.000,-	APBD		100 %	450.000.000,-
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Rekening Air dan Listrik	Kab. Malinau	12 Laporan	85.000.000,-	APBD		12 Laporan	100.000.000,-
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Fasilitasi dan sosialisasi PTDI-STTD)	Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi	Kab. Malinau	4 Laporan	350.000.000,-	APBD		4 Laporan	450.000.000,-
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang	Persentase	Kab.	100 %	345.000.000,-	APBD		100 %	Totalkan,-

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Malinau						
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Malinau	3 unit	30.000.000,-	APBD		6 unit	60.000.000,-
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya - Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Malinau	6 unit	15.000.000,-	APBD		7 unit	20.000.000,-
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Malinau	6 unit	300.000.000,-	APBD		7 unit	400.000.000,-
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemeliharaan fasilitas perhubungan	Kab. Malinau	100 %	170.000.000,-	APBD		100 %	ditotal,-
2.15.02.2.02	Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Malinau	100 %	50.000.000,-	APBD		100 %	100.000.000,-
2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota - Rambu-rambu Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Malinau	100 unit	50.000.000,-	APBD		150 unit	100.000.000,-
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Sarana dan Prasarana	Kab. Malinau	100 %	50.000.000	APBD		100 %	100.000.000,-

		Terminal yang Dilakukan Pengembangan							
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal : - Desa Wisata Pulau Sapi - Desa Wisata Long Loreh	Jumlah Gedung Terminal Yang terbangun	Kab. Malinau	2 Unit	0	APBD I		1 Unit	0,-
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Kab. Malinau	1 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000,-
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Malinau	100 %	20.000.000	APBD		100 %	30.000.000,-
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Pengawasan Perparkiran)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	5 Laporan	20.000.000	APBD		5 Laporan	30.000.000,-
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Malinau	100 %	0,-	APBD I / APBN	APBD I / APBN	100 %	0,-
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Malinau	4 Unit	0,-	APBD I / APBN	APBD I / APBN	4 Unit	0,-
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk jaringan jalan	Kab. Malinau	100 %	50.000.000,-	APBD	APBD	100 %	60.000.000,-

		Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Pemeliharaan Traficlight)	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Malinau	4 unit	50.000.000,-	APBD	APBD	4 unit	60.000.000,-
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Malinau	100 %	0,-	APBD I		100 %	0,-
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Malinau	1 laporan	0,-	APBD		1 laporan	0,-
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase fasilitas Perhubungan	Kab. Malinau	100 %	3.060.000.000,-	APBD I / DAK	APBD I / DAK	2 Paket	4.000.000.000,-
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Malinau	100 %	1.060.000.000,-	APBD I / DAK	APBD I / DAK	100 %	1.500.000.000,-
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal - Pembangunan Pelabuhan Speed Kecil Rute KTT	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I /	APBD I /	1 Unit	0,-
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal - Rehab Sisi Darat Pelabuhan Speed	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang beroperasi dan terpelihara	Kab. Malinau	1 Unit	1.060.000.000,-	DAK	DAK	1 Unit	1.500.000.000,-

	Express Malinau Kota								
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	100 %	2.000.000.000,-	APBD I / DAK	APBD I / DAK	100 %	1.500.000.000,-
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau - Lokasi prioritas (Desa Pujungan) - Desa lokpri lainnya	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	2 Unit	2.000.000.000,-	DAK	DAK	2 Unit	2.500.000.000,-
2.15.03.2.13.02	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - Dermaga Beton Long Mekatif	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I	APBD I	1 Unit	0,-
2.15.03.2.13.02	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - Dermaga Permanen Lalut Benyiu	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I	APBD I	1 Unit	0,-
2.15.03.2.13.02	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - Dermaga Kanaan	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I	APBD I	1 Unit	0,-
2.15.03.2.13.02	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - Normalisasi Giram Turuk Long Kebinu	Jumlah Pengoperasian Lintasan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBN	APBN	1 Unit	0,-
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN								
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Prosentase Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta pemeliharaan Lapangan Udara Perintis	Kab. Malinau	100 %	0,-	APBD I	APBD I	100 %	0,-
2.15.04.3.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Prosentase tersedianya Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta pemeliharaan Lapangan Udara	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I	APBD I	1 Unit	0,-

		Perintis							
2.15.04.3.02.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lapangan Udara - Lapangan Udara Perintis Long Sule	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang tersedia	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I	APBD I	1 Unit	0,-
2.15.04.2.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lapangan Udara - Lapangan Udara Perintis Long Alango	Jumlah Bandar Udara yang dikelola	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I	APBD I	1 Unit	0,-
TOTAL					12.312.262.972,-	TOTAL			14.670.000.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi OPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Untuk rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024
Kabupaten Malinau

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Malinau	100 %	9.274.302.972,-	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	Kab. Malinau	100 %	4.934.302.972,-	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	532 orang/bulan	4.934.302.972,-	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malinau	100 %	200.000.000,-	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malinau	3 Paket	200.000.000,-	APBD

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	100 %	542.040.000,-	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	3 paket	137.040.000,-	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	20 paket	175.000.000,-	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Malinau	3 paket	30.000.000,-	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malinau	12 Laporan	200.000.000,-	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malinau	100 %	2.647.960.000,-	APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan - Roda 4 (1 Unit) dan Roda 2 (3 Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan	Kab. Malinau	4 Unit	647.960.000,-	APBD
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Malinau	1 Unit	1.000.000.000,-	APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Malinau	2 Unit	1.000.000.000,-	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malinau	100 %	435.000.000,-	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Rekening Air dan Listrik	Kab. Malinau	12 Laporan	85.000.000,-	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Fasilitasi dan sosialisasi PTDI-STTD)	Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi	Kab. Malinau	4 Laporan	350.000.000,-	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Malinau	100 %	345.000.000,-	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Malinau	3 unit	30.000.000,-	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya - Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Malinau	6 unit	15.000.000,-	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Malinau	6 unit	300.000.000,-	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemeliharaan fasilitas perhubungan	Kab. Malinau	100 %	170.000.000,-	APBD
	Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Malinau	100 %	50.000.000,-	APBD
	Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	Kab. Malinau	100 unit	50.000.000,-	APBD

	- Rambu-rambu Perlengkapan Jalan	Tersedia				
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Kab. Malinau	100 %	50.000.000	APBD
	Pembangunan Gedung Terminal : - Desa Wisata Pulau Sapi - Desa Wisata Long Loreh	Jumlah Gedung Terminal Yang terbangun	Kab. Malinau	2 Unit	0	APBD I
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Kab. Malinau	1 Unit	50.000.000	APBD
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Malinau	100 %	20.000.000	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Pengawasan Perparkiran)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	5 Laporan	20.000.000	APBD
	Peningkatan Sumber Daya Manusia PKB	Persentase SDM Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Malinau	100 %	100.000.000,-	APBD I / APBN
	Penyediaan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Malinau	4 Orang	100.000.000,-	APBD I / APBN
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	100 %	50.000.000,-	APBD
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Pemeliharaan Traficlight)	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Malinau	1 unit	50.000.000,-	APBD
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Malinau	100 %	0,-	APBD I
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Malinau	1 laporan	0,-	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase fasilitas Perhubungan	Kab. Malinau	100 %	3.060.000.000,-	APBD I / DAK
	Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Malinau	100 %	1.060.000.000,-	APBD I / DAK
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal - Pembangunan Pelabuhan Speed Kecil Rute KTT	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun	Kab. Malinau	1 Unit	60.000.000,-	APBD I /
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal - Rehab Sisi Darat Pelabuhan Speed Express Malinau Kota	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang beroperasi dan terpelihara	Kab. Malinau	1 Unit	1.060.000.000,-	DAK
	Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	100 %	2.000.000.000,-	APBD I / DAK
	Pembangunan Pelabuhan Sungai	Jumlah Pembangunan	Kab.	2 Unit	2.000.000.000,-	DAK

	dan Danau - Lokasi prioritas (Desa Pujungan) - Desa lokpri lainnya	Pelabuhan Sungai dan Danau	Malinau			
	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - Dermaga Beton Long Mekatif	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I
	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - Dermaga Permanen Lalut Benyiu	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I
	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - Dermaga Kanaan	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I
	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - Normalisasi Giram Turuk Long Kebinu	Jumlah PengoperasianLintasan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Prosentase Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta pemeliharaan Lapangan Udara Perintis	Kab. Malinau	100 %	0,-	APBD I
	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Prosentase tersedianya Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta pemeliharaan Lapangan Udara Perintis	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lapangan Udara - Lapangan Udara Perintis Long Sule	Jumlah PengoperasianLintasan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lapangan Udara - Lapangan Udara Perintis Long Alango	Jumlah PengoperasianLintasan Sungai dan Danau	Kab. Malinau	1 Unit	0,-	APBD I
					12.434.262.972,-	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. **Output Rencana Kerja** Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau adalah **Program Tahunan** Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kab.Malinau selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DINAS PERHUBUNGAN. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Malinau, 13 Maret 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Ajang Kahang, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

Nip. 19681012 199803 1 009